

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian salah satunya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma yang menyebutkan bahwa hak untuk memperoleh pangan adalah salah satu hak asasi manusia.

Saat ini pola konsumsi beras mulai meluas ke wilayah-wilayah yang berpola pangan pokok non beras sehingga kebutuhan masyarakat akan ikut meningkat dengan cukup tinggi. Menurut Nurmalina (2007) hal ini disebabkan karena masyarakat masih mengidentikkan beras dengan pangan, sehingga mementingkan cukupnya ketersediaan beras dalam jumlah yang cukup.

Permintaan akan beras yang tinggi juga diikuti dengan tingginya tingkat konsumsi beras per kapita. Hal ini sesuai dengan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (2013) yang menyebutkan bahwa beras menempati komoditi pertama bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi per kapita dalam setahun yaitu sebesar 85.514 kg. Ini menunjukkan bahwa beras merupakan komoditi pertanian yang memegang peranan terpenting di Indonesia.

Tingginya tingkat permintaan akan beras seharusnya juga diikuti dengan tingkat kesejahteraan petani yang semakin meningkat. Namun tingkat kesejahteraan petani justru berada di bawah garis kemiskinan. Pendapatan keluarga petani diperkirakan kurang lebih sebesar Rp500 ribu per bulan sehingga masalah kemiskinan petani menjadi masalah krusial (Sunarti dalam Insyafiyah dan Wardhani, 2014).

Salah satu penyebab rendahnya pendapatan keluarga petani yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan sampai berada di bawah garis kemiskinan yaitu karena dalam melaksanakan usahatani mereka dihadapi oleh berbagai risiko kegagalan panen. Dalam kondisi gagal panen, petani bisa mengalami kerugian dalam jumlah besar.

Kerugian yang dialami petani dalam hal ini sebagian besar dalam bentuk finansial seperti modal yang dipakai untuk menyediakan sarana produksi.

Untuk di Padang sendiri, berdasarkan penuturan Padang Ekspres sampai pada September 2018 telah tercatat bahwa sekitar 70 hektar sawah terancam gagal panen karena areal sawah petani diterjang bencana banjir. Pasalnya, terjadi luapan air sungai karena hujan deras. Kerusakan lahan pertanian tersebar di 11 kecamatan, mulai dari 0,25 hektar sampai 50 hektar. Kelurahan Bungus Barat merupakan daerah yang paling luas tingkat kerusakannya yaitu sekitar 40 hektar tanaman yang baru disemai rusak. Kerusakan ini menyebabkan hasil panen menurun dan bahkan kehilangan hasil panen, yang mana salah satu petani menjawab yang seharusnya mendapatkan panen 30 karung tetapi berkurang menjadi 8 karung. Petani lain juga menjelaskan bahwa lahan pertaniannya menjadi rusak dan tidak dapat ditanami lagi akibat banjir. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan dana yang besar untuk menggerakkan tanah agar sawah bisa ditanami lagi.

Untuk dapat menanggulangi kondisi seperti di atas, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan yang dilakukan dalam upaya untuk melindungi petani beras, disamping tetap menjaga agar jumlah pasokan beras tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut diantaranya subsidi bibit, subsidi pupuk, bantuan saprodi, serta kredit program untuk sektor pertanian seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional (2014), bantuan tersebut dirasa belum cukup mampu mengatasi berbagai masalah di sektor pertanian terutama masalah gagal panen yang disebabkan oleh kondisi alam/faktor alam.

Berdasarkan pasal 37 ayat 2 dikatakan bahwa kerugian petani akibat gagal panen diantaranya disebabkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sebagai bentuk advokasi kepada petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin (Kementerian Pertanian, 2016).

Dalam usahatani padi sendiri, Kementerian Pertanian mengupayakan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dengan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTP. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik dan lainnya.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penjamin sebagian risiko yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa angka keikutsertaan AUTP per Juli 2017 sudah mencapai 358.189 hektar. Pada tahun sebelumnya, lahan yang berhasil diklaim seluas 10.977 hektar dengan nilai Rp 66 Miliar (Jasindo, 2017).

Dalam uji coba AUTP petani hanya menanggung premi sebesar Rp20% dari total premi yaitu sebesar Rp 36 ribu/hektar/musim tanam. Sedangkan sisanya sebesar 80% (Rp 144 ribu per hektar per musim tanam) ditanggung oleh BUMN pupuk. Pembagian porsi premi antara petani dan BUMN pupuk sebesar 20%:80% berdasarkan kesediaan petani dalam *public hearing*, dimana sebagian besar petani menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pilot project asuransi usaha tani padi dengan catatan premi yang dibayarkan mendapat subsidi dari pemerintah (Insyafiah dan Wardhani, 2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanian merupakan salah satu usaha yang dianggap rawan karena dalam pelaksanaan usahanya sering dihadapi oleh kemungkinan risiko yang tinggi, seperti

risiko iklim, cuaca, pasar, dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Risiko-risiko tersebut jika tidak diantisipasi maka akan berdampak terhadap melemahnya motivasi petani untuk dapat mengembangkan usahatani.

Selama ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan program untuk membantu sektor pertanian. Beberapa kebijakan di sektor pertanian seperti subsidi bibit, subsidi pupuk, bantuan sarana produksi pertanian, serta program kredit untuk sektor pertanian telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, bantuan tersebut dirasa belum cukup untuk membantu petani dalam mengatasi berbagai masalah di sektor pertanian terutama masalah gagal panen yang disebabkan oleh kondisi perubahan iklim yang tidak menentu (Wahyudi, 2015).

Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap petani sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, seperti: (a) petani memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya, (b) meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber Pembiayaan, (c) mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usahatani yang baik.

Selama berjalannya program AUTP, timbul berbagai respon petani terhadap AUTP. Pada umumnya petani yang menolak mengikuti program AUTP merasa tidak membutuhkan AUTP karena wilayah tempat berusahatani mereka tidak rawan bencana, kurangnya sosialisasi dari penyuluh dalam penyebarluasan informasi, dan melihat kerugian petani lain yang telah menerapkan AUTP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kawanishi *et al.* (2016) yang menjelaskan bahwa petani enggan mengikuti asuransi karena mereka kecewa tidak mendapatkan ganti rugi karena kerusakannya dibawah ambang, tidak dikembalikannya uang yang telah mereka bayarkan karena tidak mengalami kerusakan, dan kesulitan prosedur klaim.

Sedangkan petani yang setuju umumnya ingin merasakan manfaat dari AUTP setelah melihat keberhasilan petani lain yang sudah lebih dulu menerapkannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) menunjukkan bahwa partisipasi petani untuk mengikuti AUTP berhubungan dengan status keanggotaan petani dalam

Gerakan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Hal ini berarti petani dalam mengikuti AUTP bukan berdasarkan keinginannya sendiri melainkan karena adanya program bantuan lain. Selain itu penelitian yang dilakukan Legita (2017) menunjukkan bahwa petani yang sudah mengikuti AUTP memutuskan untuk tidak lagi mau mengikuti program jika tidak ada lagi subsidi premi dari pemerintah. Hal ini penting dan patut untuk dikhawatirkan karena memungkinkan terganggunya kelancaran program dalam jangka waktu yang lama dan adanya kemungkinan petani tidak akan mengikuti program secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa realisasi AUTP di Indonesia tahun 2017 sudah hampir mencapai target dimana 997.960 hektar lahan yang sudah terdaftar dari target 1 juta hektar. Sedangkan untuk di Sumatera Barat sendiri, realisasi AUTP per 31 Desember 2017 masih jauh di bawah target dengan persentase 43,62% dimana lahan yang sudah diasuransikan yaitu seluas 15.266,55 ha dari target 35.000 ha dengan nilai setor petani per hektarnya sebesar Rp 549.595.836. Sedangkan total luas lahan yang sudah diklaim yaitu seluas 635,86 ha dengan nilai bayar klaim sebesar Rp 3.815.160.000.

Padang merupakan satu-satunya kota/kab yang realisasinya melebihi target atau dengan kata lain realisasinya berada di atas seratus persen. Pada Lampiran 1 terlihat bahwa realisasi program AUTP di kota Padang mencapai 160,07 persen dimana luas lahan yang telah diasuransikan seluas 2.000,88 ha dari target 1,250 ha dengan nilai setor petani per hektar sebesar Rp 72.031,500. Sedangkan total luas lahan yang sudah diklaim seluas 122,98 ha dengan nilai bayar klaim Rp 737.880.000.

Namun pada tahun 2018 tingkat realisasi program AUTP di kota Padang menurun drastis di bawah target. Berdasarkan penjelasan salah satu penanggungjawab AUTP kota Padang target program AUTP tahun 2018 yaitu sebesar kurang lebih 700 ha, namun hanya terealisasi sebesar 99,75 ha (Lampiran 2). Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 petani dalam membayar premi yang telah disubsidi sebanyak 20% disubsidi oleh CSR salah satu perusahaan sehingga petani tidak dibebankan biaya apapun untuk menjadi peserta AUTP. Setelah dana CSR tidak diberikan di tahun 2018, hanya sedikit petani yang berminat untuk mengikuti program ini.

Setelah tidak ada lagi dana CSR premi yang diberikan, dibandingkan tahun 2017 sebanyak 8 kecamatan di kota Padang yang terdaftar dalam program AUTP kini hanya tersisa menjadi 4 kecamatan yang terdaftar (Lampiran 2). Kecamatan-kecamatan yang tergabung yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Kecamatan Kuranji merupakan kecamatan dengan jumlah peserta terbanyak yaitu berjumlah 86 orang peserta. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah hingga mencapai 482 orang peserta.

Perkembangan program asuransi pertanian di Indonesia khususnya AUTP dipengaruhi oleh berbagai faktor. Petani merupakan sasaran program AUTP, sehingga persepsi petani terhadap kinerja atribut AUTP dan kepuasan petani terhadap program AUTP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan program asuransi pertanian di Indonesia. Petani yang memiliki penilaian yang bagus terhadap kinerja atribut-atribut AUTP akan merasa puas terhadap program AUTP. Petani yang puas akan merekomendasikan kepada petani yang belum ikut AUTP untuk bergabung sebab asuransi sangat bermanfaat untuk petani di Indonesia dan mengikuti program AUTP secara berkelanjutan. Analisis persepsi petani terhadap kinerja atribut-atribut AUTP juga penting untuk dilakukan supaya dapat mengetahui atribut atau aspek mana saja yang dianggap berlebihan dalam pelaksanaannya, aspek yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan masukan untuk perbaikan dan koreksi dalam pengembangan AUTP.

Dengan menurunnya tren perkembangan program AUTP di Kecamatan Kuranji dapat mengindikasikan bahwa petani merasa kurang puas terhadap program AUTP. Agar petani dapat ditingkatkan kepuasannya salah satu caranya yaitu dengan mengetahui, mengkoreksi, dan meningkatkan atribut-atribut dalam program AUTP yang dirasa penting bagi petani sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk pengembangan program AUTP selanjutnya.

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kepuasan petani terhadap program AUTP. Oleh karena itu, maka rumusan masalah atau pertanyaan pokok penelitian ini adalah “bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap program AUTP?” Dari uraian di atas maka penulis

ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Tingkat Kepuasan Petani terhadap Program AUTP di Kelurahan Kuranji Kota Padang”**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan umum yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan petani terhadap program AUTP. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Menganalisis persepsi petani atas kinerja (*performance*) dan kepentingan atribut-atribut AUTP
3. Menganalisis tingkat kepuasan petani terhadap atribut-atribut AUTP

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program AUTP.
2. Bagi petani, dapat memberikan pengetahuan mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP).
3. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan judul penelitian ini.
4. Bagi peneliti, selain menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian di Universitas Andalas, penelitian ini merupakan salah satu proses belajar dan menambah pengetahuan dan pengalaman.